

**FUNGSI PENGAWASAN DISTRIBUSI KARTU TANI  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGADAAN  
PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN  
SIMALUNGUN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**TATI APRINA MANIK**

**NPM 1703100080**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

**Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:


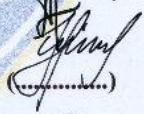
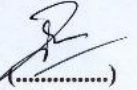
Nama Mahasiswa : **TATI APRINA MANIK**  
NPM : 1703100080  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari,tanggal : Selasa, 10 Juni 2021  
Waktu : 08.00 s.d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **DEDI AMRIZAL, S.Sos.,M.Si**

PENGUJI II : **JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos.,M.Si**

PENGUJI III : **IDA MARTINELLI, SH., MM**

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**



  
**Drs. ZULFAHMI M.I.KOM**



## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **TATI APRINA MANIK**  
NPM : 1703100080  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Distribusi Kartu Tani Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Simalungun

Medan, 22 Juni 2021

PEMBIMBING

  
**IDA MARTINELLI, SH.,MM**

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

  
**NALIL KHARIAH, S.IP., M.Pd**

DEKAN

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**



**UMSU**  
Unggul | s | Terpercaya

## SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini Saya, Tati Aprina Manik NPM 1703100079 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian dan ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 22 Juni 2021

Yang Menyatakan



**Tati Aprina Manik**

**NPM. 1703100080**

# **Fungsi Pengawasan Distribusi Kartu Tani Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Simalungun**

**Tati Aprina Manik**

**1703100080**

## **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Distribusi Kartu Tani Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Simalungun. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dari lima narasumber diketahui bahwa Fungsi Pengawasan Distribusi Kartu Tani Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Simalungun sudah tercapai namun belum terlaksana dengan efektif, Hal tersebut didasarkan pada kategorisasi seperti adanya Penetapan Standar dalam Pendistribusian Kartu Tani Di Kabupaten Simalungun sudah tercapai , dalam artian pengawasan distribusi kartu tani sudah sesuai dengan standar pelaksanaan yang ditetapkan, Kegiatan Pengawasan sudah terlaksana dengan baik meskipun masih kurang efektif dikarenakan program tersebut masih baru di Kabupaten Simalungun, Kemudian Bimbingan dan Arahan sudah tercapai meskipun belum maksimal dilihat dari sosialisasi yang telah dilakukan di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun, Selanjutnya untuk Tindakan koreksi dan perbaikan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun belum melakukan tindakan tersebut terkait dengan distribusi kartu tani hal tersebut ditandai dengan belum adanya penyimpangan terkait Kartu Tani di Kabupaten Simalungun. Adapun hambatan dalam melakukan pengawasan disebabkan oleh program Kartu tani yang masih dikatakan baru di Kabupaten Simalungun dan masih dalam tahap penyaluran, serta kondisi lingkungan Kabupaten Simalungun yang cukup luas sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan sosialisasi secara bertahap dalam pengawasan Distribusi Kartu Tani di Kabupaten Simalungun.

**Kata Kunci:** Distribusi, Fungsi Pengawasan, Kartu Tani



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa terucapkan Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Pembangunan Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul **“FUNGSI PENGAWASAN DISTRIBUSI KARTU TANI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN SIMALUNGUN”**

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moral maupun material. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang teristimewa dan yang utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua penulis yaitu **Ayahanda Alm.Henri Manik** dan **Ibunda Rohani Tindaon** yang telah mendukung dan membantu penulis baik dari segi moril maupun material. Yang selalu mendukung, memotivasi serta memberikan doa restu kepada penulis

untuk maju mencaicita-cita penulis. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi penulis dalam melangkah kedepan untuk pribadi yang jauh lebih baik. Karena dengan doa restu dan tetesan keringat mu wahai orang tua penulis bisa mencapai cita-cita penulis hari ini telah kudapati apa yang penulis impikan yang telah penulis tempuh dengan cucuran keringat, keyakinan dan kesabaran, engkau telah mengantarku ke hari depan. Dalam penyelesaian pendidikan penulis sampai akhir penulisan skripsi ini kumohon ya Allah semoga mereka selalu dalam lindungan-Mu amin...

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof.Dr.Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Drs Zulfahmi, M.I kom** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd** selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Ida Martinelli, S.H., M.M.** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan

skripsi ini.

7. Dosen seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh pegawai staf biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
9. Para pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun serta BPP Kecamatan Dolok Panribuan yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan riset.
10. Teman-teman terdekat penulis yang selalu menghibur penulis dan selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi, **Anggi Kartika Marpaung, Sella Amelia, Reni Kesuma Putri, Indy Lestari, dan Faridah Juliana Sari** yang sama-sama berjuang meraih jenjang sarjana.
11. Untuk teman-teman seperjuangan **Resty Septia Pratiwi, Henni Putri Siregar, Diah Ayu Ratna Ningsih, Sanvi Ambarita, dan Icha Rahwana** yang sama-sama berjuang meraih jenjang sarjana.
12. Terkhusus untuk **Nur Hidayat Ahmad** yang telah menghibur dan memberi semangat secara virtual
13. Untuk **Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai wadah penulis dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dan pengalaman.
14. Kepada seluruh teman-teman kelas A IAP sore pembangunan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang selama penulis duduk di perkuliahan sampai akhirnya penyelesaian skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya amin.

Medan, 03 Maret 2021

Tati Aprina Manik

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan... ..	5
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>7</b>
2.1 Konsep Pengawasan .....	7
2.1.1 Indikator Pengawasan .....	8
2.1.2 Prinsip dan Teknik Pengawasan .....	11
2.1.3 Jenis Pengawasan.....	14
2.1.4 Fungsi Pengawasan ... ..	16
2.2 Distribusi .....	17
2.3 Pengawasan Distribusi .....	18
2.4 Pupuk Bersubsidi .....	19

2.5 Kartu Tani .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Kerangka Konsep .....	23
3.3 Defenisi Konsep .....	24
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	25
3.5 Narasumber atau Informan.....	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7 Teknik Analisis Data.....	28
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	29
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.. .....</b>	<b>44</b>
4.1 Hasil Penelitian .. .....	44
4.1.1 Deskripsi Narasumber.....	44
4.1.2 Penyajian Data .....	47
4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi .....	47
4.2 Pembahasan.....	53
4.2.1 Analisis Hasil Wawancara .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
5.1 Simpulan .....	58
5.2 Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA ..... 61**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur.....	46
Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pendidikan.....	46

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Proses Pengawasan.....	11
Gambar 2.2 Mekanisme Penerimaan Kartu Tani.....	20
Gambar 3.1 Kerangka Konsep .....	23
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Lembar Pengesahan

Lampiran II : Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran III : SK- I Permohonan Penetapan Judul

Lampiran IV : SK- II Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran V : SK- III Surat Permohonan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VI : SK – IV Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VII : SK – V Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran VIII : Surat Izin Penelitian Universitas

Lampiran IX : Surat Izin Penelitian Balitbang

Lampiran X : Surat Keterangan Selesai Penelitian Dinas

Lampiran XI : Surat Bebas Pinjaman Buku Perpustakaan

Lampiran XII : SK-X Undangan Ujian Skripsi

Lampiran XIII : Draft Wawancara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah lahan pertanian yang cukup tinggi, hal tersebut menyebabkan mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai Petani. Namun sangat disayangkan mayoritas Petani Indonesia masih berada dibawah garis kemiskinan. Sedangkan dapat diketahui bahwa sektor pertanian merupakan penyumbang besar pendapatan Negara.

Dalam Upaya mengatasi kemiskinan di bidang pertanian, Pemerintah Republik Indonesia membuat terobosan baru untuk meningkatkan kesejahteraan petani, yakni kebijakan pemerintah dalam menciptakan petani yang mandiri dan memiliki sumber daya manusia yang memadai, serta meningkatnya hasil produktivitas dengan membuat kebijakan pupuk bersubsidi.

Adanya proses distribusi pupuk bersubsidi sangat penting sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden NO.77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No 15 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pertanian No 69/Permentan/SR.310/12/016 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk sector Pertanian TA 017; serta Peraturan Menteri Perdagangan No.15/M-Dag/Per/4/013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Sektor Pertanian. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk



Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Selain untuk mensejahterakan petani alasan dibalik terbentuknya kebijakan tersebut adalah sering terjadinya kelangkaan pupuk yang disebabkan oleh oknum-oknum penjual pupuk. Dikarenakan pemesanan pupuk hanya menggunakan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) sebagai salah satu persyaratan untuk membeli pupuk. RDKK belum memuat luasan tanah setiap warga, sehingga pengecer dan oknum pedagang yang memiliki uang lebih dapat membeli dengan leluasa tanpa pengawasan yang ketat. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan terkait pengawasan, pengadaan dan penyaluran pupuk diantaranya belum tepat sasaran, dan berdampak buruk terhadap hubungan produsen, distributor, maupun konsumen.

Sebagaimana ditegaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, maka diperlukan instrumen untuk pelaksanaan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui Distribusi Kartu Tani.

Setiap penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar distribusi pupuk bersubsidi sesuai peruntukannya. Maka Dari itu Pemerintah Kabupaten Simalungun berkerja sama dengan PT.Bank Negara Indonesia (Persero) untuk membuat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi yang menggunakan alat yang disebut Kartu Tani.

Kartu Tani merupakan kartu debit atau ATM yang apabila telah diaktifkan dapat diisi dengan saldo untuk kemudian digunakan sebagai alat transaksi pupuk bersubsidi di kios resmi. Ukuran keberhasilan program ini adalah transaksi pupuk tidak lagi menggunakan uang tunai melainkan dengan menggunakan Kartu Tani. Selain itu Kartu Tani juga digunakan untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi bagi pemiliknya yakni petani di mesin EDC. Saldo di dalam Kartu Tani otomatis berkurang apabila jatah pupuk telah diambil oleh pemiliknya.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun bekerja sama dengan Pihak BNI (Persero) mulai melaksanakan distribusi Kartu Tani kepada para petani yang memiliki hak untuk menggunakan pupuk bersubsidi. Meski demikian masih ada kendala yang terjadi dalam proses Distribusi Kartu Tani yakni salah satunya validasi data dari para petani. Petugas-petugas di lapangan sering menghadapi tantangan tertentu dalam melakukan proses validasi dan lain sebagainya. Hal itu dianggap para petani sebagai proses yang sangat merepotkan. Kemudian, sosialisasi seperti masalah kemauan para petani untuk berpartisipasi.

Dari Hasil Survei sementara di lapangan oleh Penyuluh Pertanian Kabupaten Simalungun, hingga saat ini Pendistribusian Kartu Tani di Kabupaten Simalungun, adalah 28.300 Kartu, namun kartu tersebut belum optimal dibagikan kepada seluruh petani dan ada sebagian kartu yang sudah dibagikan, tetapi belum dapat digunakan para petani untuk penebusan pupuk bersubsidi.

Hingga saat ini belum ada penelitian yang relevan tentang kartu tani sehingga sangat perlu dilakukan penelitian tentang pengawasan pelaksanaan

Distribusi program kartu tani. Hal ini penting dikarenakan kartu tani sebagai kebijakan pemerintah untuk alat penebusan pupuk bersubsidi diharapkan efektif dalam proses pendistribusiannya. Program ini ditujukan kepada petani yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan rendah dengan kemampuan mengaplikasikan teknologi yang terbatas.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Fungsi Pengawasan Distribusi Kartu Tani Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Simalungun”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Fungsi Pengawasan Distribusi Kartu Tani Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Simalungun ?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui Bagaimana Fungsi Pengawasan Distribusi Kartu Tani Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Simalungun.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan kemampuan berpikir penulis melalui karya ilmiah
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan pengawasan distribusi kartu tani di Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan pelaksanaan program-program pemerintah khususnya kesejahteraan petani.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah Konsep Pengawasan, Indikator Pengawasan, Teknik Pengawasan, Prinsip Pengawasan,



Jenis Pengawasan, Fungsi Pengawasan, Distribusi, Pengawasan Distribusi, Pupuk Bersubsidi, Kartu Tani, serta Tujuan dan Manfaat Kartu Tani.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber atau Informan, Waktu dan Lokasi Penelitian, Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah data penelitian yang diperoleh dari lapangan yang di analisis sehingga penelitian ini Dapat memberikan hasil pembahasan yang diberikan atas permasalahan yang diteliti

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah Memuat Simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Konsep Pengawasan**

Pengawasan dikenal dengan suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pemerintah sumberdaya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Menurut Darwis (2009:125) Pengawasan adalah proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian dan pengoreksian daripada semua pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan/kegiatan organisasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Darma (2004:1) mengatakan Pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan yang telah ditetapkan, dengan pedoman pada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan. Bila ditemukan tindakan atau aktivitas yang menyimpang dari standar atau petunjuk baku yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur dan ukuran yang ditetapkan.

Menurut Satriadi (2015:289) Pengawasan adalah hal yang dilakukan, artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu

mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Menurut Handoko (2012:359) Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan untuk mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

### **2.1.1 Indikator Pengawasan**

Menurut Robbins and Coulter (2016:290) indikator pengawasan terdiri dari empat yaitu: (1) Menetapkan standar (Standards) yakni penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi; (2) Pengukuran (Measurement) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik

intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil; (3) Membandingkan (Compare) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar; (4) Melakukan tindakan (Action) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

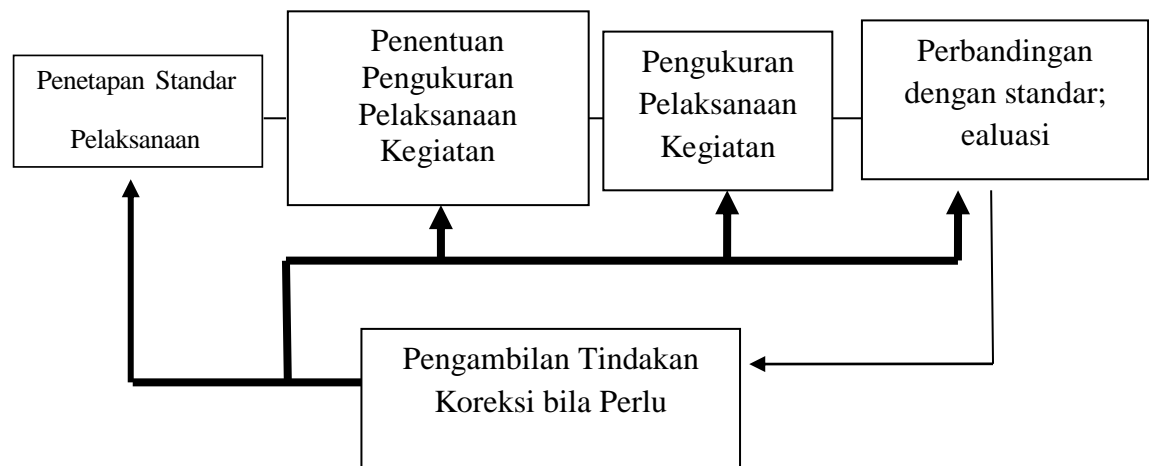
Menurut Pasaribu (2011:34-35) Pengawasan diukur berdasarkan indikatornya, yaitu: (1) Pemantauan yaitu memeriksa langsung perihal atau orangnya sendiri bagian mana peristiwanya terjadi dan dimana bawahan itu bertugas; (2) Pemeriksaan yaitu pengawasan yang dilakukan melalui pengamatan, pencatatan, penyelidikan dan penelaahan secara cermat dan sistematis serta melalui penilaian terhadap segala yang ada kaitannya dengan pekerjaan; (3) Bimbingan dan pengarahan yaitu segala kegiatan yang dilakukan pimpinan dalam memberikan saran terhadap pelaksanaan tugas; (4) Tindakan disiplin yaitu segala usaha yang dilakukan pimpinan terhadap bawahan dalam rangka memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku; (5) Tindakan koreksi yaitu segala upaya yang dilakukan pimpinan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan bawahan.



Menurut Hariandja (2002), beberapa dimensi yang dipakai untuk mengukur pengawasan yaitu: (1) Menentukan alat ukur (pedoman baku standar) pelaksanaan. Tahap pertama dalam pengawasan adalah menetapkan ukuran standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasi; (2) Mengadakan penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan yaitu suatu penilaian yang dilakukan oleh pengawas dengan melihat hasil kerjanya dan laporan tertulisnya; (3) Mengadakan perbaikan atau pembetulan atas penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Melakukan tindakan koreksi/perbaikan bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan ini dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan mungkin diperbaiki, atau keduanya mungkin dilakukan bersamaan.

Menurut Handoko (2012:362) Pengawasan dapat diukur melalui paling sedikit lima tahap (langkah) yakni; (a) Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan) mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar; (b) Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Pelaksanaan seharusnya diukur setiap setiap jam, harian, mingguan, bulanan, dalam bentuk tulisan, inspeksi visual, melalui telepon, dan siapa yang akan terlibat manajer, staf departemen; (c) Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus; (d) Perbandingan Pelaksanaan dengan Standard an Analisa

Penyimpangan, Penyimpangan-penyimpan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai, dan bagaimana pentingnya hal ini bagi pembuat keputusan untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan; (e) Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan, Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.



Gambar 2.1 Proses Pengawasan

### 2.1.2 Prinsip-Prinsip dan Teknik Pengawasan

Menurut Simbolon (2004:69) prinsip-prinsip pengawasan yaitu : (1) Pengawasan harus berorientasi pada tujuan organisasi; (2) Pengawasan menjamin daya dan hasil guna pekerjaan; (3) Pengawasan harus terus menerus; (4) Hasil Pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (Feed back) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang; (5) Pengawasan harus berdasarkan atas standar objektif;

(6) Pengawasan harus jujur mendahulukan pada kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi; (7) Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

Menurut Siagian (2004:176) pengawasan akan berjalan efektif apabila memiliki berbagai ciri yakni: (1) Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan; (2) Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya defiasi dari rencana; (3) Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategi tertentu ; (4) objektivitas dalam melakukan pengawasan; (5) Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi; (6) Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat; (7) Efisiensi pelaksanaan pengawasan; (8) Pengawasan harus bersifat membimbing.

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi manajemen dengan menggunakan 2 macam teknik yakni : (1) Pengawasan langsung, ialah apabila pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan; (2) Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, laporan itu dapat berupa berbentuk tulisan dan lisan.

Menurut Kencana (2010:84) pengawasan berdasarkan pengecualian adalah pengawasan dilaksanakan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengawasan semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer. Pengawasan dilakukan oleh

badan–badan yang berkompeten sebagaimana telah disampaikan, dengan pemantauan pengamatan terhadap pekerjaan serta hasil kerja para birokrat.

Menurut Siagian (2014) mengungkapkan tentang teknik pengawasan yang terbaik dalam dua kategori, yaitu teknik pengawasan langsung dan tidak langsung. Berikut penjelasan masing-masing teknik tersebut; (a) Teknik pengawasan langsung yaitu pengawasan secara langsung merupakan proses pengawasan yang dilakukan dengan cara langsung melalui pengamatan dan laporan secara langsung. Dan; (b) Teknik Pengawasan tidak langsung ialah Teknik Pengawasan yang dilakukan pengawas dari jarak jauh dengan cara mempelajari laporan yang disampaikan oleh pegawai, kepala sekolah, guru dan personel lainnya. Laporan dalam bentuk tertulis maupun laporan lisan.

Menurut Marsaoly (2016) mengatakan bahwa “Teknik pengawasan yang dipakai meliputi pengawasan langsung dengan jalan menginspeksi langsung ke lokasi atau menerima laporan langsung maupun teknik pengawasan secara tidak langsung yang dapat diketahui melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh pegawainya”. Variabel pengawasan diukur oleh Siagian (2018) yang mengemukakan bahwa Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni: (1) Pengawasan Langsung (direct control) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk a. Inspeksi langsung, b. On The Spot Observation, c. On The Spot Report. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar

seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. karena itu pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung; (2) Pengawasan tidak langsung (indirect control) Adalah pengawasan jarak jauh. pengawasan ini melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: a. Tertulis, b. Lisan

### **2.1.3 Jenis Pengawasan**

Jenis-jenis pengawasan menurut Siagian (1955) ada dua yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung: (a) *Pengawasan langsung* adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung ; (b) *Pengawasan tidak langsung* adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah disampaikan oleh para bawahannya, laporan ini dapat berupa tertulis dan lisan.

Menurut (Nurcholis, 2007;313-314) Pengawasan ada dua jenis yakni pengawasan Preventif dan pengawasan Represif; (1) Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah dalam pengertian yang lebih operasional. Pengawasan preventif adalah pengawasan terhadap pemerintahan daerah agar pemerintah daerah tidak menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan yang lain; (2) Pengawasan represif yaitu pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah,

Keputusan DPRD, maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pengawasan menurut Winardi (2000) terbagi menjadi 3 tipe atas dasar fokus aktivitas pengawasan, yaitu antara lain: (1) Pengawasan Pendahuluan (Preliminary Control) nProsedur-prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibanding dengan hasil yang diperkirakan/rencanakan. Dipandang dari sudut prespektif, kebijaksanaan merupakan pedoman dimasa yang akan datang. Merumuskan kebijakan-kebijakan termasuk dalam fungsi perencanaan sedang tindakan implementasi kebijakan merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Pengawasan Pendahuluan meliputi: 1. Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia 2. Pengawasan pendahuluan Modal 3. Pengawasan pendahuluan Bahan-bahan 4. Pengawasan pendahuluan sumber daya finansial;

(2) Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (Concurrent Control) Adalah merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh supervisor yang mengarahkan pekerjaan bawahannya. Direction berhubungan dengan tindakan para manager untuk berupaya: 1. Mengajarkan para bawahan bagaimana cara yang baik untuk menerapkan metode atau standart kerja (SOP). 2. Mengawasi pekerjaan harus disesuaikan dengan standart yang ada, supaya hasil yang diharapkan sesuai dengan cita-cita Proses pengawasan ini tidak hanya meliputi cara apa yang dipakai atau dikomunikasikan namun juga sikap perorangan memberikan penyerahannya; (3) Pengawasan Feed Back (Feed Back Control) Ciri khas dari metode pengawasan

ini adalah feed back (umpan balik) adalah dipusatkan pada hasil historikal sebagai landasan untuk mengoreksi tujuan yang akan datang.

#### **2.1.4 Fungsi Pengawasan**

Pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting dan merupakan salah satu dari lima fungsi manajemen, yaitu: (1) *Planning* (perencanaan); (2) *Organizing* (pengorganisasian); (3) *Depertemenisasi* (penyusunan staf); (4) *Actuating* (penggerakan); (5) *Controlling* (pengawasan) Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mencapai tujuan. Demikian juga dengan hal fungsi pengawasan, dimana pengawasan hanya mungkin dilakukan apabila fungsi-fungsi manajemen yang lain telah ada dan mendukung berjalannya pengawasan tersebut.

Menurut Suprihanto (2003:102) berbagai fungsi pokok pengawasan diantaranya adalah sebagai berikut : (1) Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan- kesalahan, artinya bahwa pengawasan yang baik adalah suatu pengawasan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, kesalahan, ataupun penyelewengan; (2) Untuk memperbaiki berbagai penyimpangan atau kesalahan yang terjadi artinya dengan adanya pengawasan haruslah dapat diusahakan cara- cara tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kesalahan; (3) Untuk mengatur organisasi serta segenap kegiatan manajemen lainnya, yakni dengan adanya pengawasan diharapkan sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan; (4) Untuk mempertebal rasa tanggung jawab, memperhatikan nomor 1 s/d 3 diatas adanya

pengawasan yang rutin mengakibatkan setiap bagian berikut pengawasan akan selalu bertanggung jawab terhadap semua tugas yang dilakukan, sehingga tidak akan muncul tindakan saling menyalahkan dalam pelaksanaan tugas.

Menurut Ernie dan Saefulah (2005:12), fungsi pengawasan adalah :

(a) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang di tetapkan; (b) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan; (c) Melakukan berbagai alternatifif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Maringan (2004:62), fungsi pengawasan adalah :

(a) Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan; (b) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.; (c) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

## **2.2 Distribusi**

Distribusi merupakan aspek yang sangat penting untuk melancarkan kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Menurut Winardi (2005), Distribusi adalah sekumpulan perantara dalam penyaluran produk-produk kepada konsumen (pembeli) yang terhubung erat antara satu dengan yang lainnya.

Sedangkan menurut Kotler (2007), Distribusi adalah sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran barang atau jasa siap



untuk dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen (pembeli). Jadi distribusi merupakan suatu kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen agar diperoleh barang yang sesuai keinginan dapat tersedia tepat pada waktunya.

Sedangkan menurut Angipora (2002:296) menyatakan bahwa saluran distribusi yaitu sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dan suatu produk untuk menciptakan kegunaan pasar tertentu. Dapat disimpulkan bahwa saluran distribusi merupakan salah satu proses atau kegiatan penting yang berkaitan dengan pemberian barang dari produsen ke distributor atau perantara yang akhirnya sampai ke konsumen atau pemakai.

Menurut Skotler (2007;122) Saluran distribusi adalah sekumpulan organisasi yang saling terkait dan termasuk dalam proses untuk menghasilkan suatu barang atau jasa.

### **2.3 Pengawasan Distribusi**

Menurut Herujito (2002) Pengawasan adalah mengamati dan mengalokasikan dengan tempat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengawasan itu suatu tindakan pengamatan dan pemantauan hal-hal yang dilakukan dengan kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan ditempat.

Sedangkan Distribusi Menurut Daryanto (2011), adalah salah satu aspek pemasaran, Distribusi merupakan suatu tindakan atau suatu proses penyaluran barang dari satu atau kumpulan organisasi produsen kepada konsumen. Distribusi

adalah suatu media organisasi yang saling menggantung dalam menyiapkan satu produk untuk dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen/pengguna.

Pengawasan Distribusi merupakan, suatu proses atau tindakan pengamatan dan pemantauan penyaluran barang dari satu kumpulan organisasi produsen kepada konsumen, dengan kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dilapangan.

#### **2.4 Pupuk Bersubsidi**

Menurut Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 yang dimaksud dengan pupuk subsidi yaitu barang yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaannya dan penyaluran mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Jadi yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaannya mendapatkan potongan biaya dari pemerintah dengan mekanisme pengawasan tertentu yang ditujukan bagi petani di sektor pertanian terdiri atas jenis Pupuk Urea, SP-36,ZA, NPK dan Pupuk Organik.

## 2.5 Kartu Tani

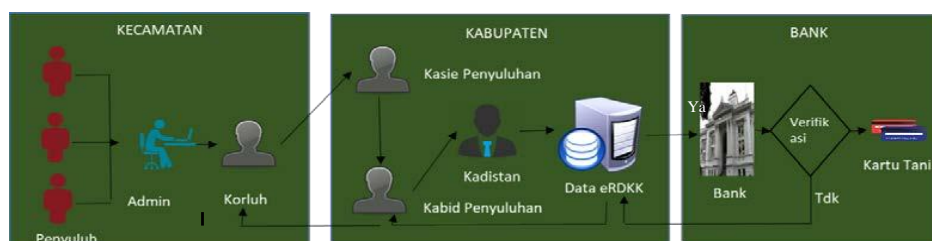
Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC) milik bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) antara lain; Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI) yang ditempatkan di pengecer/kios resmi untuk penebusan pupuk bersubsidi (kompas.com). Kebijakan ini dibuat berangkat dari berbagai peristiwa atas tindak penyimpangan pupuk bersubsidi sehingga memberikan dampak negatif yang merugikan bagi berbagai pihak, terutama bagi petani. Dengan begitu, diharapkan melalui program Kartu Tani penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih terjamin dan tepat sasaran (Permana, 2017:36).

Tujuan dari program Kartu tani bagi masyarakat adalah penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dengan berlandaskan pada enam asas yaitu Tepat jenis, Tepat jumlah, Tepat mutu, Tepat lokasi, Tepat waktu, Tepat harga. Petani yang menggunakan kartu tani mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan diseluruh agen atau kios yang telah ditentukan, dimana kegiatan pertanian dapat berjalan aman tanpa terganggu oleh tidak tersedianya pupuk bersubsidi. Kartu tani juga berfungsi sebagai tabungan yang dapat digunakan petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Manfaat dari kartu tani ini dapat diterima tiga stakeholder yaitu bagi pemerintah, bagi petani, dan bagi pihak ketiga : (1) Bagi pemerintah : (a) Memiliki database petani yang tersaji lebih akurat dan terintegrasi, (b)

Mengetahui informasi luas lahan pertanian per komoditas per wilayah, (c) Kebijakan berdasarkan informasi perkiraan hasil panen, (d) Menyalurkan subsidi dan bantuan sosial lainnya lebih tepat sasaran ; (2) Bagi petani : (a) Kepastian ketersediaan saprotan bersubsidi/nonsubsidi, (b) Kemudahan penjualan hasil panen oleh off taker (tanpa melalui perantara), (c) Kemudahan akses pembiayaan (KUR), (d) Menumbuhkan kebiasaan menabung (tidak konsumtif), (e) Biaya simpanan lebih ringan, (f) Mendapatkan program Prona (BPN), (g) Kemudahan mendapatkan subsidi (Kemenkeu, Kementan, Kemenkop), (h) Kemudahan mendapatkan bansos; (3) Bagi pihak ketiga: (a) Informasi perkiraan jadwal panen (per komoditas dan sebaran wilayah), (b) Penyediaan anggaran serapan hasil panen, (c) informasi untuk penyediaan gudang dan penanganan pasca panen, (d) Informasi kebutuhan pupuk beserta sebaran wilayahnya, (e) Distribusi pupuk lebih akurat dan sesuai 6 Tepat (Jumlah, Waktu, Tempat, Mutu, Jenis, Sasaran), (f) Mempermudah manajemen stok dan perkiraan produksi pupuk, (g) Kemudahan transaksi pembayaran hasil panen kepada petani melalui sistem pembayaran yang terintegrasi.

Mekanisme penerbitan Kartu Tani yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.2 Mekanisme Penerbitan Kartu Tani

1. Data e-RDKK yang sudah disetujui oleh Kadistan, akan diambil secara elektronik oleh Bank kemudian diverifikasi. Apabila datanya sesuai dengan persyaratan perbankan akan diterbitkan Kartu Tani. Bila tidak/belum sesuai akan dikembalikan ke dinas secara elektronik;
2. Data yang dikembalikan oleh Bank, akan diteruskan kepada Kordinator Penyuluh;
3. Koordinator Penyuluh akan memerintahkan Penyuluh untuk memperbaiki dan melengkapi data petani yang kurang; dan Ya
4. Penyuluh akan memperbaiki dan melengkapi data petani yang kurang. Setelah lengkap, penyuluh akan menyerahkan kembali data kepada Admin Kecamatan untuk di upload sebagaimana proses awal.

### **Penebusan Menggunakan Kartu Tani**

Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin Electronic Data Capture di pengecer resmi. Mekanisme penggunaan kartu tani adalah sebagai berikut: (1) Data e-RDKK yang sudah disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten, akan diambil oleh Bank secara elektronik untuk diverifikasi kevalidan datanya; (2) Data petani yang sudah valid akan dibuatkan Kartu Tani diisi volume usulan kebutuhan pupuknya. Kemudian diserahkan kepada petani yang bersangkutan; (3) Data petani yang belum valid akan dikembalikan oleh Bank kepada Dinas Kabupaten secara elektronik; (4) Bank akan menggandeng kios pengecer resmi pupuk sebagai agen Bank. Kios pengecer yang sudah menjadi agen Bank akan diberikan EDC sebagai alat transaksi Kartu Tani;

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

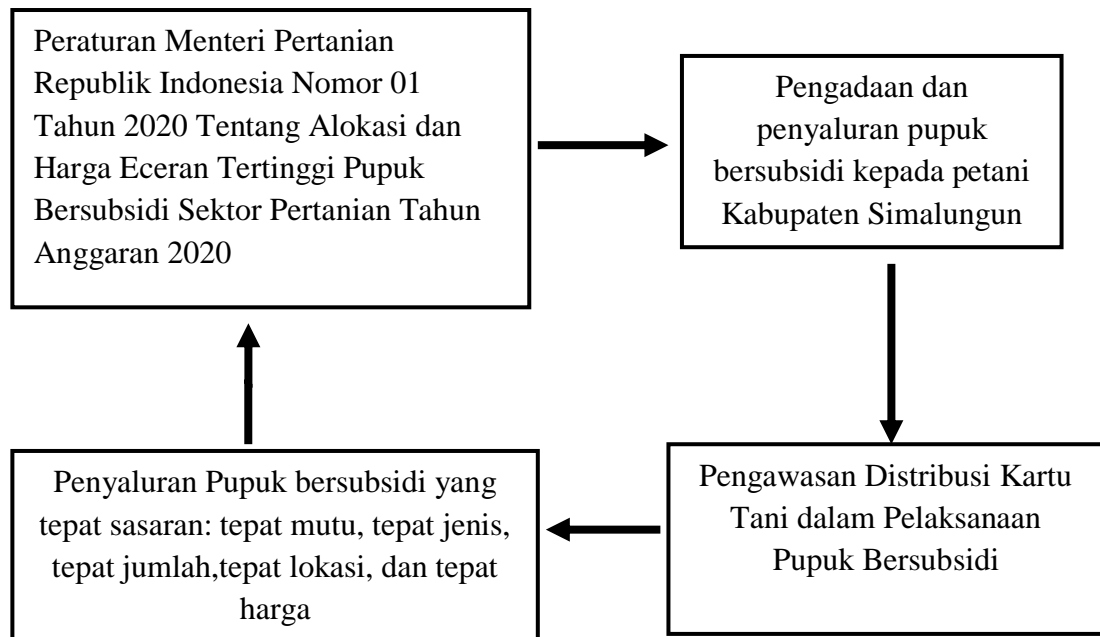
#### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan, keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta.

Menurut Sugiyono (2010:11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Menurut Moelong (2006:11) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata – kata gambar, dan bukan angka – angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif . Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain – lain.

### 3.2 Kerangka Konsep



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

### 3.3 Defenisi Konsep

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

- a. Pengawasan adalah suatu kegiatan administrasi yang bertujuan untuk mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai , maka segera diambil

langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

- b. Distribusi adalah sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran barang atau jasa siap untuk dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen (pembeli). Jadi distribusi merupakan suatu kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen agar diperoleh barang yang sesuai keinginan dapat tersedia tepat pada waktunya.
- c. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah
- d. Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC) milik bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) antara lain; Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI) yang ditempatkan di pengecer/kios resmi untuk penebusan pupuk bersubsidi.

### **3.4 Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi



penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya standar (*Standards*) penetapan patokan (target) terhadap pendistribusian kartu tani
- b. Adanya Kegiatan pengawasan Distribusi kartu tani
- c. Adanya Bimbingan dan pengarahan dalam pengawasan distribusi kartu tani
- d. Adanya Tindakan Koreksi dan Perbaikan Distribusi Kartu Tani

### **3.5 Narasumber atau Informan**

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang mampu atau yang mengetahui informasi. Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber atau informan.

Adapun narasumber yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah :

1. Nama : Sinto Hutapea, SP  
 Usia : 54 Tahun  
 Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas  
 Pertanian Kabupaten Simalungun
2. Nama : Jhon Kliwon Manik  
 Usia : 52 Tahun  
 Jabatan : Penyuluh Pertanian Kecamatan Dolok Panribuan

3. Nama : Gindo Ambarita SP  
Usia : 38 Tahun  
Pekerjaan : Petani
4. Nama : Risma Purba  
Usia : 49 Tahun  
Pekerjaan : Petani
5. Nama : Amri Tindaon  
Usia : 53 Tahun  
Pekerjaan : Petani

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2012:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik atau metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Teknik Wawancara, Menurut Nazir (2003:193-194) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (paduan wawancara). Dalam hal ini pengguna menggunakan teknik wawancara *in-depth interview*.

Wawancara *In –depth interview* (wawancara mendalam) menurut Bungin, (2007:108) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relative lama.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Moeloeng (2006:247) mengatakan bahwa Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang menyajikan data yang dimulai dengan menelaah, menyusun, dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan peneliti. Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menjelaskan fungsi pengawasan distribusi kartu tani di Kabupaten Simalungun. Sebelum dianalisis data-data yang peneliti peroleh dalam penelitian terlebih dahulu diklarifikasikan sesuai dengan jenisnya sehingga didapatkan data yang benar-benar lengkap sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kategorisasi. Kategorisasi merupakan salah satu tumpukan seperangkat yang penyusunannya berdasarkan penggolongan sebagai suatu proses dan hasil pengelompokan unsur bahasa dan bagian pengalaman manusia yang digambarkan untuk mengungkapkan makna dengan berbagai potensi yang ada. Teknik analisis kategorisasi disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu

dengan cara mengukur satu variabel penelitian yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui.

Dalam penelitian ini data yang didapat akan diolah berdasarkan kategorisasi yang sudah dibuat. Tiap kategorisasi dibuat berdasarkan teori yang ada kemudian dibuat kesimpulan. Dari kesimpulan tiap kategorisasi dijadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini.

### **3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu dan lokasi Penelitian untuk penelitian ini adalah Maret 2021- Mei 2021 Di Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, Sondi Raya, Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara 21162.

### **3.9 Deskripsi Singkat Objek Penelitian Penelitian**

#### **a) Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun**

##### *1) Visi*

***“Terwujudnya Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Petani yang Sejahtera”***

##### *2) Misi*

Untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan oleh Visi tersebut, maka Dinas Pertanian menetapkan beberapa Misi pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani dan aparatur serta penguatan kelembagaan dibidang pertanian
2. Mengoptimalkan daya dukung potensi sumber daya alam pertanian
3. Memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan sarana produksi secara efektif, efisien dan ramah lingkungan
4. Memfasilitasi penggunaan dan penguasaan teknologi dan informasi dibidang pertanian
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produk pertanian mengelola sistem usaha agribisnis yang baik guna meningkatkan pendapatan petani

**b) Tugas Pokok dan Fungsi**

**Kepala Dinas Pertanian** mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian;

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pengembangan prasarana pertanian;
- c. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian
- d. penyediaan benih tanaman, benih/bibit ikan, ternak dan hijauan pakan ternak;

- e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman serta penyakit ikan dan hewan;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
- n. pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pertanian;
- o. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- q. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- r. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **A. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pertanian memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian; Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dibidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- b) pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c) penataan organisasi dan tata laksana;
- d) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan;
- e) pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f) penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h) bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- i) menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi**

Mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran serta program dan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pertanian;
- b) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- c) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pertanian;
- d) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran dibidang pertanian;
- e) melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan dibidang pertanian;
- f) penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- g) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
- h) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian;
- i) melakukan penyusunan laporan kinerja dibidang pertanian;
- j) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;



- k) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya;
- l) bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- m) menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset**

mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a) melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara;
- b) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c) melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- d) melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- e) melakukan urusan gaji pegawai;
- f) melakukan administrasi keuangan;
- g) melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h) melakukan penyusunan laporan keuangan;

- i) melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- j) melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k) melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- l) melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
- m) melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- n) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;
- o) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya;
- p) bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- q) menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a) melakukan urusan kepegawaian,tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan;

- b) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c) melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- d) melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pension pegawai;
- e) melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- f) melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- g) melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- h) melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- i) melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j) melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- k) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasianm kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- l) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya;
- m) bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- n) menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian**

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a) melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana dan sarana pertanian;
- b) penyusunan kebijakan dibidang prasarana dan sarana pertanian;
- c) penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d) pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e) penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f) pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g) pemberian fasilitasi investasi pertanian berupa pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang pertanian;
- h) pemantauan dan evaluasi dibidang sarana dan prasarana pertanian;
- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j) bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- k) menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Kepala Bidang Tanaman Pangan**

Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a) melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan.
- b) penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan;
- c) penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman pangan;
- d) pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang tanaman pangan;
- e) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan; pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan;
- f) pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g) pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan

#### **D. Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan**

Mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a) melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang produksi tanaman pangan.
- b) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- c) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dibidang peningkatan produksi tanaman pangan;
- d) melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
- e) melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi dibidang tanaman pangan;
- f) melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;

#### **E. Kepala Bidang Holtikultura**

Kepala Bidang Holtikultura mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a) melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura. a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;
- b) penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;

- c) pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang hortikultura;
- d) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- e) pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang hortikultura;
- f) pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura
- g) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang hortikultura;
- h) pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;
- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- j) bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **F. Kepala Bidang Perkebunan**

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a) melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan di bidang perkebunan.
- b) Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- c) Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;

- d) Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- e) Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- f) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- g) Penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- h) Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- i) Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;

### **UPT BP3**

- 1) UPT BP3 adalah terdiri dari :
  - a. 32 (tiga puluh dua) UPT BP3 Kecamatan
  - b. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Jawa Tengah
  - c. UPTD Balai Benih Hortikultura Purba
  - d. UPTD Kebun Induk Perkebunan Panei Tengah
- 2) UPT BP3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- 3) Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;



- 4) Kegiatan teknis melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas;
- 5) Pengaturan tentang UPT BP3 mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati tersendiri.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

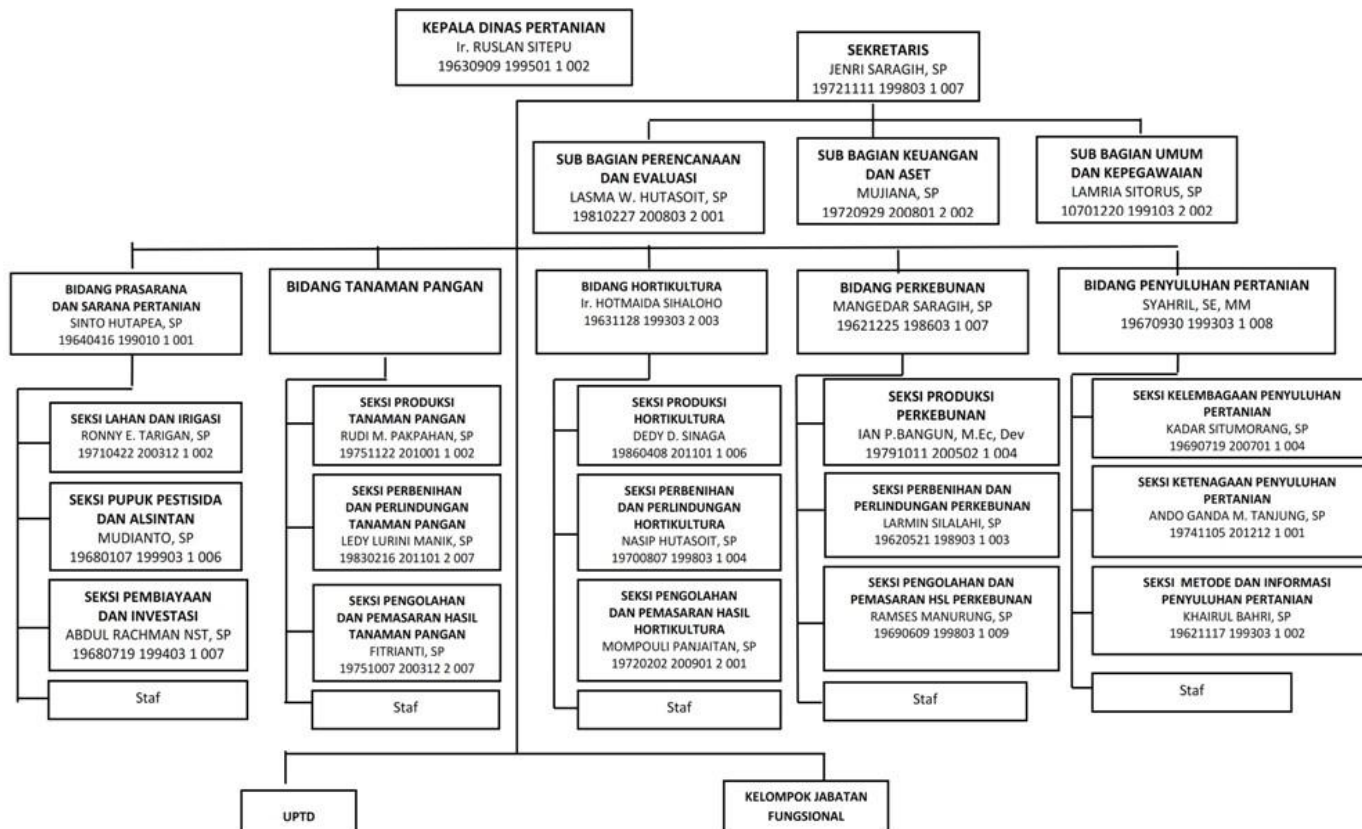
- 1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:
  - a. Penyuluh Pertanian
  - b. Pengawas Benih Tanaman
  - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
  - d. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
  - e. Analis Pasar Hasil Pertanian
- 2) Kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 3) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- 4) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

### C. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2019

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAB. SIMALUNGUN  
NOMOR : 24 TAHUN 2016



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Bab ini membahas dari menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa informan di Dinas Pertanian Kabupaten Simaungun terkait dengan Fungsi Pengawasan Distribusi Kartu Tani Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Simalungun.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis. Adapun penyajian data selanjutnya dengan langkah- langkah dengan sebagai berikut :

##### **4.1.1 Deskripsi Narasumber**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokan data – data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pekerjaan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis, sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

#### **a. Distribusi Narasumber menurut Jenis Kelamin**

Narasumber hanya di kelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki – laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing – masing kategori sebagai berikut :

**Tabel 4.1.1**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Laki-laki	4	90 %
2	Perempuan	1	10%
Jumlah		5	100 %

*Sumber: Hasil Penelitian 2021 di Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun*

Berdasarkan table 4.1.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang dengan presentase 90% sedangkan 1 orang berasal dari narasumber berjenis kelamin perempuan dengan frekuensi 1 atau 10%

#### **b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Usia**

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun dan umur 50-59 tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan presentase masing-masing kategori umur sebagai berikut :

**Tabel 4.1.2**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	30-39 Tahun	1	20 %
2	40-49 Tahun	1	20 %
3	50-59 Tahun	3	60 %
Jumlah		5	100 %

*Sumber: Hasil Penelitian 2021 di Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun*

Berdasarkan table 4.2 diatas dapat dilihat bahwa narasumber berumur 30-39 tahun dan umur 40-49 tahun seimbang dengan frekuensi 1 orang atau 20%. Sedangkan narasumber 50-59 tahun dengan frekuensi 3 orang atau 60%.

### **c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

**Tabel 4.1.3**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	S1	3	60 %
2	SMA	2	40 %
Jumlah		5	100 %

*Sumber: Hasil Penelitian 2021 di Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun*

Berdasarkan table 4.1.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber pendidikan S1 dengan frekuensi 3 orang atau 60%. Sedangkan narasumber pendidikan dengan frekuensi 2 orang atau 40%.

#### **4.1.2 Penyajian Data**

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu dengan Bapak Sinto Hutapea SP selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun , Bapak Jhon Kliwon Ambarita selaku Pegawai Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Dolok Panribuan (BPP), Ibu Risma Purba, Bapak Amri Tindaon dan Bapak Gindo Ambarita SP selaku Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun.

#### **4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

**a. Adanya standar (*Standards*) penetapan patokan (target) terhadap pendistribusian kartu tani**

Standar mengandung arti sebagai satuan pengukuran yang digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil,tujuan, sasaran, kuota dan target yang digunakan sebagai standar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Senin, 5 april 2021 Pukul 11.00 WIB bersama Bapak Sinto Hutapea SP selaku kepala bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun. Beliau mengatakan ; Standar pelaksanaan pengawasan distribusi kartu tani dalam rangka pelaksanaan pengadaan pupuk bersubsidi dikabupaten Simalungun harus berdasarkan dengan alat ukur yakni Kuantitas, Kualitas dan Waktu. Pelaksanaan Pendistribusian Kartu Tani Di Kabupaten Simalungun saat ini masih dalam tahap pendistribusian dikarenakan Program Kartu Tani Di Kabupaten Simalungun

masih baru, hal tersebut senada dengan Pernyataan Bapak Jhon Kliwon Ambarita selaku Pegawai Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun Pada Sabtu, 10 April 2021 bahwa Pelaksanaan pengawasan Distribusi Kartu Tani saat ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, Kartu Tani Di Kabupaten Simalungun sejauh ini sudah sesuai didistribusikan kepada Petani sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya Di Kecamatan Dolok Panribuan.

Berdasarkan Hasil Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Kartu Tani Di Kabupaten Simalungun sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standar pelaksanaan pengawasan kartu Tani harus berdasarkan dengan alat Ukur yakni Kuantitas, Kualitas, dan waktu.

#### **b. Adanya Kegiatan pengawasan Distribusi kartu tani**

Kegiatan Pengawasan yang dimaksud adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Pengawasan Kartu Tani Di Kabupaten Simalungun tidak luput dari peran Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida KP3 ini mempunyai tugas dan kewajiban mengawasi alur distribusi pupuk dari distributor ke kios pengecer sampai kepada petani, disamping melalui KP3 untuk mengamankan pupuk subsidi ini diterbitkanlah kartu tani yang diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam RDKK, kartu tani ini berisi tentang kuota

pupuk subsidi yang berhak diperoleh oleh petani di Kabupaten Simalungun, sehingga pupuk subsidi ini benar benar tepat sasaran dan tidak jatuh kepada orang yang tidak berhak mendapatkan pupuk subsidi.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan Bersama Bapak Sinto Hutapea SP selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada tanggal 5 April 2021 bahwasannya dalam pendistribusian Kartu Tani Pemerintah Bekerja sama dengan Pihak BUMN (BNI) , Kartu Tani tersebut didistribusikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani oleh pihak BNI dan bekerjasama dengan Penyuluh di Tingkat Desa maupun Kecamatan Kabupaten Simalungun. Kemudian, untuk tenaga pengawas dalam pelaksanaan pengawasan pupuk bersubsidi sampai saat ini sudah tersedia.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun belum melakukan pengawasan dengan efektif dikarenakan program kartu Tani di Kabupaten Simalungun masih baru dan masih dalam tahap penyaluran. Kemudian, Sumber daya Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun masih memiliki pengetahuan yang kurang terkait pengawasan Kartu Tani dikarenakan Program Kartu Tani di Kabupaten Simalungun masih baru saja di salurkan. Terkait dengan Kerjasama pendistribusian Kartu Tani dalam hal ini Pemerintah bekerja sama dengan pihak BNI untuk mendistribusikan Kartu Tani sudah berjalan dengan baik.



**c. Adanya Bimbingan dan Pengarahan Dalam Pengawasan Distribusi Kartu Tani di Kabupaten Simalungun**

Bimbingan dan Pengarahan yaitu segala kegiatan yang dilakukan pimpinan dalam memberikan saran terhadap pelaksanaan tugas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Senin 05 April 2021 dengan Bapak Sinto Hutapea Selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun bahwasannya di beberapa kecamatan sudah dilakukan sosialisasi Kartu Tani.

Hal tersebut juga senada dengan wawancara bersama Bapak Jhon Kliwon Ambarita Selaku Pegawai Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Dolok Panribuan, bahwasannya sudah dilakukan sosialisasi penggunaan Kartu Tani di beberapa Kecamatan di Kabupaten Simalungun , sejauh ini Pengawasan terkait distribusi Kartu Tani Di Kabupaten Simalungun Khususnya Di Kecamatan Dolok Panribuan masih dilakukan sebatas Pengawasan Langsung oleh Penyuluh maupun KP3 Kabupaten Simalungun, Dikarenakan Program Kartu Tani Di Kabupaten Simalungun masih belum terlaksana dengan efektif dan masih sebatas pendistribusian kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani, dan sampai saat ini belum ditemukan penyimpangan terkait Pendistribusian Kartu Tani, sampai saat ini pun pengawasan tentang pendistribusian kartu tani masih rutin dan selalu dilakukan.

Kemudian Jawaban lain, Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Tanggal 21 April 2021 pukul 10.00 WIB bersama Bapak Gindo Ambarita SP, yang merupakan salah satu petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Desa

Marihat Huta Kecamatan Dolok Panribuan, bahwasannya Di Desa Marihat Huta belum dilakukan sosialisasi Kartu Tani, dan sosialisasi Kartu Tani masih hanya dilakukan di beberapa Kecamatan Di Kabupaten Simalungun, dan sampai saat ini beberapa Petani belum mengetahui bagaimana Fungsi maupun Kegunaan dari Kartu Tani tersebut.

Hal tersebut Juga senada dengan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Amri Tindaon yang merupakan salah satu Petani di Kecamatan Dolok Panribuan, bahwasannya belum dilakukan sosialisasi Kartu Tani, dan sampai sejauh ini Kartu Tani masih sebatas penyaluran kepada petani akan tetapi belum semua petani yang tergabung dalam kelompok Tani yang belum mendapatkan Kartu Tani. Berdasarkan Wawancara bersama Ibu Risma Purba pada tanggal 26 April 2021 Pukul 09.00 WIB bahwasannya sampai saat ini belum ditemukan penyimpangan dilapangan terkait pendistribusian Kartu Tani di Kabupaten Simalungun. Dan pengawasan yang dilakukan BPP maupun Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun masih sebatas pengawasan langsung.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan distribusi Kartu Tani di Kabupaten Simalungun belum terlaksana dengan efektif hal tersebut ditandai dengan belum dilakukannya sosialisasai terkait penggunaan dan manfaat Kartu Tani di Seluruh Kecamatan dan Tingkat Desa yang ada di Kabupaten Simalungun, selain sosialisasi, pengawasan Kartu Tani belum dapat dikatakan rutin dilakukan dikarenakan masih sebatas Pengawasan langsung , dan sampai sejauh ini belum ditemukan penyimpangan dilapangan terkait pendistribusian kartu Tani di Kabupaten Simalungun.

#### **d. Adanya Tindakan Koreksi dan Perbaikan**

Tindakan koreksi adalah segala usaha yang dilakukan pimpinan dalam memperbaiki kesalahan atau penyimpangan. Tindakan Korektif yang dilakukan Dinas Pertanian dan Badan Penyuluh Pertanian adalah suatu tindakan untuk mengukur dalam pengawasan Distribusi Kartu Tani dalam pelaksanaan pengadaan pupuk bersubsidi, apakah sudah sesuai dengan yang telah direncanakan dan tepat sasaran serta tepat waktu.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Sinto Hutapea SP, selaku kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Kabupaten Simalungun Senin 05 april 2021 bahwa sejauh ini, terkait pengawasan Distribusi Kartu Tani yang masih bersifat pengawasan secara langsung oleh penyuluh maupun Dinas Pertanian belum dilakukan tindakan Koreksi dan Perbaikan terkait Distribusi Kartu Tani. Namun jika untuk Pupuk Bersubsidi sudah dilakukan tindakan koreksi bilamana terjadi penyimpangan dilapangan terkait pupuk bersubsidi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, untuk Strategi Dinas Pertanian dalam meningkatkan Pelaksanaan Distribusi Kartu Tani yakni, Sosialisasi Yang akan dilakukan di seluruh kecamatan maupun desa yang ada di Kabupaten Simalungun.

Hal tersebut juga Senada dengan wawancara bersama Bapak Jhon Kliwon Ambarita selaku Pegawai BPP Kecamatan Dolok Panribuan bahwasannya untuk meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Kartu Tani Di Kabupaten Simalungun salah satunya adalah dengan sosialisasi Penggunaan dan Manfaat

Kartu Tani kepada masyarakat maupun Petani di Seluruh Kecamatan maupun Desa yang ada di Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa belum adanya tindakan koreksi maupun perbaikan terkait distribusi kartu tani, namun lain halnya dengan pengadaan pelaksanaan pupuk bersubsidi, tindakan koreksi sudah dilakukan dengan rutin dan untuk meningkatkan Pengawasan dalam pelaksanaan distribusi kartu Tani strategi yang dilakukan Dinas Pertanian adalah dengan melakukan sosialisasi penggunaan kartu tani kepada petani yang tergabung kedalam kelompok Tani yang ada di seluruh Kecamatan Kabupaten Simalungun.

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1 Analisis Hasil Wawancara**

Pada sub ini, dari hasil penyajian data yang akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang Fungsi Pengawasan Distribusi Kartu Tani Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Simalungun. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis berdasarkan wawancara yang penulis lakukan.

**a. Adanya Penetapan Standar Dalam Distribusi Kartu Tani Di Kabupaten Simalungun**

Penetapan Standar mengandung arti sebagai suatu patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Maka dengan itu Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dengan BPP Kecamatan Dolok Panribuan melakukan pengawasan berdasarkan target, sasaran maupun kuota Kartu Tani kepada Petani yang tergabung Dalam kelompok Tani.

Berdasarkan Hasil Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Kartu Tani Di Kabupaten Simalungun sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, Standar pelaksanaan pengawasan kartu Tani harus berdasarkan dengan alat Ukur yakni Kuantitas, Kualitas, dan waktu. Pengawasan Pendistribusian Kartu Tani di Kabupaten Simalungun sudah dilakukan berdasarkan target maupun sasaran yang telah ditetapkan meskipun sampai saat ini pendistribusian di beberapa kecamatan masih belum efektif dikarenakan program Kartu Tani masih baru di Kabupaten Simalungun.

Menurut Handoko (2009:90) Dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil – hasil.

Berdasarkan Pendapat diatas Penetapan Standar dalam Pendistribusian Kartu Tani yang dilakukan Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun sudah tercapai.

### **b. Adanya Kegiatan Pengawasan Distribusi Kartu Tani**

Kegiatan Pengawasan yang dimaksud adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Maka dengan itu Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun meningkatkan Sumber Daya Manusia maupun tenaga pengawas yang cukup untuk meningkatkan kegiatan pengawasan Distribusi Kartu Tani di Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa belum efektifnya kegiatan pengawasan Distribusi Kartu Tani, Dalam Hal ini Dinas Pertanian sudah bekerja sama dengan Pihak BNI (Persero) dalam pendistribusian Kartu Tani di Kabupaten Simalungun, Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun sampai saat ini sudah memiliki tenaga pengawas dalam pengawasan Kartu Tani. Tenaga pengawas Kartu Tani sama halnya dengan pengawasan pupuk Bersubsidi, namun untuk kedepannya belum diketahui apakah masih ada perubahan atau tidak, dikarenakan Kartu Tani di Kabupaten Simalungun masih dalam Tahap Penyaluran.

Kegiatan Pengawasan menurut Siagian (2011:56) Kegiatan Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat diatas Kegiatan Pengawasan Pendistribusian Kartu Tani oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun sudah tercapai namun belum efektif.

**c. Adanya Bimbingan dan Pengarahan dalam Pengawasan Distribusi Kartu Tani di Kabupaten Simalungun**

Bimbingan dan Pengarahan yaitu segala kegiatan yang dilakukan pimpinan dalam memberikan saran terhadap pelaksanaan tugas. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan distribusi Kartu Tani di Kabupaten Simalungun belum terlaksana dengan efektif hal tersebut ditandai dengan belum dilakukannya sosialisai terkait penggunaan dan manfaat Kartu Tani di Seluruh Kecamatan dan Tingkat Desa yang ada di Kabupaten Simalungun, selain sosialisasi, pengawasan Kartu Tani belum dapat dikatakan rutin dilakukan dikarenakan masih sebatas Pengawasan langsung , dan sampai sejauh ini belum ditemukan penyimpangan dilapangan terkait pendistribusian kartu Tani di Kabupaten Simalungun. Kondisi lingkungan juga mempengaruhi kegiatan pendistribusian Kartu Tani tersebut. Program kartu tani dapat menimbulkan gesekan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya jika pembagian kartu tani tidak merata ke semua petani yang seharusnya menerima kartu tani.

Menurut Pasaribu (2011;34-35) Bimbingan dan Pengarahan adalah segala kegiatan yang dilakukan pimpinan dalam memberikan saran terhadap pelaksanaan tugas. Berdasarkan Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Bimbingan dan Arahan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun maupun Penyuluh Pertanian Kabupaten Simalungun belum tercapai dengan efektif

#### **d. Adanya Tindakan Koreksi dan Perbaikan `**

Tindakan koreksi adalah segala usaha yang dilakukan pimpinan dalam memperbaiki kesalahan atau penyimpangan. Tindakan Korektif yang dilakukan Dinas Pertanian dan Badan Penyuluh Pertanian adalah suatu tindakan untuk mengukur dalam pengawasan Distribusi Kartu Tani dalam pelaksanaan pengadaan pupuk bersubsidi, apakah sudah sesuai dengan yang telah direncanakan dan tepat sasaran serta tepat waktu.

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa belum adanya tindakan koreksi maupun perbaikan terkait distribusi kartu tani, namun lain halnya dengan pengadaan pelaksanaan pupuk bersubsidi, tindakan koreksi sudah dilakukan dengan rutin dan untuk meningkatkan Pengawasan dalam pelaksanaan distribusi kartu Tani strategi yang dilakukan Dinas Pertanian adalah dengan melakukan sosialisasi penggunaan kartu tani kepada petani yang tergabung kedalam kelompok Tani yang ada di seluruh Kecamatan Kabupaten Simalungun.

Menurut Handoko (2012;362) Tindakan Koreksi dan Perbaikan dapat dilaksanakan Bila Diperlukan, Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Berdasarkan Pendapat diatas, Tindakan Koreksi dan Perbaikan terkait Pengawasan pendistribusian Kartu Tani Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun belum dilakukan dikarenakan belum ditemukan penyimpangan dilapangan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Setelah pelaksanaan penelitian berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis melengkapinya dalam penyajian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Fungsi Pengawasan Distribusi Kartu Tani Dalam Rangka Pelaksanaan pengadaan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Simalungun Sudah tercapai namun belum terlaksana dengan efektif Hal ini didasarkan pada kategorisasi yang antara lain :

- a) Dalam Distribusi Kartu Tani Di Kabupaten Simalungun, sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dalam memberikan pengawasan Distribusi kartu tani Dinas Pertanian maupun Penyuluh Pertanian Kabupaten Simalungun belum melakukan pengawasan secara efektif dan maksimal dikarenakan program Kartu Tani Di Kabupaten Simalungun masih dalam tahap penyaluran dan masih baru didistribusikan kepada petani yang tergabung dalam Kelompok Tani
- b) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, sudah melakukan kegiatan pengawasan yakni pemantauan secara langsung terkait distribusi Kartu Tani dan bekerjasama dengan Pihak BNI dalam hal pendistribusian. Namun, Sumber daya manusia Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun belum memiliki Pengetahuan yang maksimal terkait bagaimana proses pengawasan Kartu Tani.

- c) Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Simalungun, sudah melakukan Sosialisasi terkait Penggunaan dan Manfaat Kartu Tani di Beberapa Kecamatan di Kabupaten Simalungun, namun sosialisasi tersebut belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan Kondisi Lingkungan dan daerah Kabupaten Simalungun yang luas dan Kurangnya Jumlah Pengawas (KP3) Untuk Kartu Tani.
- d) Tindakan Koreksi dan Perbaikan belum dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Simalungun dikarenakan program Kartu Tani masih baru dan masih dalam tahap Penyaluran, dan sampai saat ini belum ditemukan Penyimpangan terkait pendistribusian Kartu Tani di Kabupaten Simalungun.

## **5.2 Saran**

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran yang dibutuhkan berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai Fungsi Pengawasan Distribusi Kartu Tani Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Simalungun sebagai berikut :

1. Diharapkan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dan Balai Penyuluh Pertanian Tingkat Kecamatan, lebih meningkatkan Pengawasan Kartu Tani dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Diharapkan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, lebih mengoptimalkan kinerja dalam melakukan kegiatan Pengawasan , lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia Pengawas terkait Pengawasan Distribusi Kartu Tani kepada Masyarakat.
3. Diharapkan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Penggunaan dan Manfaat Kartu Tani Kepada Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani di Kabupaten Simalungun
4. Diharapkan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, lebih meningkatkan strategi dalam melakukan Pengawasan Kartu Tani dalam rangka pengadaan pupuk bersubsidi sehingga tidak terjadi penyimpangan terkait distribusi kartu tani oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angiopora Marinus P., 2002, *Dasar-Dasar Pemasaran*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- B.F. Pasaribu, Rowlad . 2012. *Literatur Pengajaran Ekonomi Pembangunan*.  
Depok: Universitas Gundarma.
- Darma S.S.2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*.Jakarta: PT Djaniatan.
- Darwis, Dkk. 2009.*Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan.
- Handoko, T.Hani.2002.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Grasindo
- Hariandja, Marihot T.E, 2002.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:  
Grasindo
- Inu Kencana Syafiiie.2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*,  
Jakarta: Rineka Cipta
- Kotler, Philip. 2007. *Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan,  
Pengendalian*.Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Marsaoly, K. M. S., 2016. *Pengaruh Pengawasan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku Utara*. *JMS*, 2 No. 2, 24–33
- Maringan, Masry, Simbolon. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia

- Moelong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Permana, Dadih Pongding. 2017. *Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2018*
- Robbins, Stephen P. and Mary Coulter. 2016. *Manajemen, Jilid 1 Edisi 13, Alih Bahasa: Bob Sabran Dan Devri Bardani P*, Erlangga, Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2004. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Simbolon, Marigan, Masry, 2004. *Dasar-dasar Administrasi Manajemen*, Galilea Indonesia, Jakarta.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung
- Suprihanto, J, 2003. *Statiska dan Sistem Informasi Untuk Pimpinan*, Erlangga, Jakarta.
- Winardi. 2002. *Strategi Pemasaran*. Bandung: Mandar Maju

**Dokumen resmi :**

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020

[www.simalungunkab.go.id/id/dinaspertanian](http://www.simalungunkab.go.id/id/dinaspertanian)

psp.pertanian.go.id/wpcontent/uploads/2020/06/Juknis-Peyediaan-dan-Penyaluran-Pupuk-Bersubsidi-TA-2020-Revisi.pdf

**Web Pages:**

Sumber Harian Mistar, “Distribusi Kartu Tani di Kabupaten Simalungun”

selasa 29 september 2020 Diakses dari : <https://www.mistar.id/simalungun/kartu-tani-di-simalungun-mulai-disalurkan-tahap-pertama-28-300-kartu/>



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.  
**Bapak/Ibu Ketua Jurusan Naili Khairah, S.IP., M.Pd**  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 22 Januari ..... 2021..

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : TATI APRINA MANIK  
N P M : 1703100000  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
Tabungan sks : 131.0... sks, IP Kumulatif 3.63...

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	fungsi Pengawasan Distribusi kartu Tani dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Bersubsidi Di kabupaten Simalungun	
2	Efektivitas Pelayanan Pengujian kendaraan Bermotor Dalam Rangka Mengurangi Risiko kecelakaan Lalu Lintas Di kota Medan	
3	kualitas Pelayanan dalam Pelaksanaan Program PTSL (pendaftaran Tanah Sistematis lengkap) Di kantor Pertanahan kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 22 Januari ..... 2021..

Ketua  
  
( ..... )

Pemohon,

( TATI APRINA MANIK ..... )

Pembimbing

\*) dilampirkan setelah judul ditandatanganinya oleh Ketua Jurusan.



Bila meriwayab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI**  
**DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 96/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **22 Januari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **TATI APRINA MANIK**  
N P M : 1703100080  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **FUNGSI PENGAWASAN DISTRIBUSI KARTU TANI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN SIMALUNGUN**  
Pembimbing : **IDA MARTINELLI, S.H., M.M.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 008.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 22 Januari 2022.**



Ditetapkan di Medan,  
Medan, 11 Djumadil Akhir 1442 H  
25 Januari 2021 M

Dekan  
  
**Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.**

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 16 - 02 - ..... 2021.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : TATI APRINA MANIK  
N P M : 1703100000  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...96.../SK/II.3/UMSU-03/F/2021... tanggal 18-02-2021 dengan judul sebagai berikut :

FUNGSI PENGAWASAN DISTRIBUSI KARTU TANI DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN SIMALUNGUN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(IDA MARTINELI, S.H./UM)

Pemohon,

(TATI APRINA MANIK)



**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 263/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Sabtu, 27 Februari 2021  
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Online/Daring  
Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	INDAH SHOLAMITA	1703100034	Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	IDA MARTINELLI, SH, MM	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TERHADAP PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN
2	ANGGI KARTIKA MARPAUNG	1703100090	JEHAN RIDHO IZHARSHYAH, S.Sos., M.Si.	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	EFEKTIVITAS PEMANFAATAN AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) DALAM PENGAWASAN LALU LINTAS DI KOTA MEDAN
3	TATI APRINA MANIK	1703100080	Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.	IDA MARTINELLI, SH, MM	FUNGSI PENGAWASAN DISTRIBUSI KARTU TANI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN SIMALUNGUN
4	DWI PUTRI APRILIYANTI	1703100061	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	FUNGSI PENGAWASAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN MEDAN DALAM PEREDARAN MAKANAN KEMASAN DI KOTA MEDAN
5	JULIA KHAIRIYAH RITONGA	1703100081	JEHAN RIDHO IZHARSHYAH, S.Sos., M.Si.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	PEMANFAATAN PROGRAM E-ABSENSI DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN

Medan, 13 Rajab 1442 H

25 Februari 2021 M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Tati Aprina Manik  
N P M : 1703100080  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Distribusi kartu Tani Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan pupuk Bersubsidi di Kabupaten Simalungun

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	09/02-2021	Bimbingan Proposal	
2.	17/02-2021	Bimbingan Proposal	
3.	18/02-2021	Acc Proposal Skripsi	
4.	16/03-2021	Bimbingan Pevisi Seminar Proposal	
5.	24/03-2021	Bimbingan Draft Wawancara	
6.	25/03-2021	Acc Draft Wawancara	
7.	03/05-2021	Bimbingan Hasil Penelitian	
8.	27/05-2021	Pevisi Abstrak, Bab IV	
9.	28/05-2021	Acc Skripsi	

Medan, 28 Mei 2021

Dekan,

Dr. Anipin Saleh, S.Sos., M.P.

Ketua Jurusan,

NANI KHAIRIAH, S.P., M.Ed.

Pembimbing,

IDA MARTINELLI, S.H.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 603/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Kamis, 10 Juni 2021  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PEMBIMBING	
6	SELLA AMELIA	1703100079	IDA MARTINELLY, SH., MM	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENERTIBAN PEMBANGUNAN DI KOTA MEDAN
7	TATI APRINA MANIK	1703100080	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IDA MARTINELLY, SH., MM	FUNGSI PENGAWASAN DISTRIBUSI KARTU TANI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN SIMALUNGUN
8	FARIDAH JULIANA SARIN POS-POS	1703100064	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)</i> DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA PARIWISATA DI KOTA MEDAN
9						
10						

Notulis Sidang :

1.



Ditetapkan oleh :  
a.n. Rektor  
Wakil Rektor I

MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Medan, 26 Syawal 1442 H

07 Juni 2021 M

Panitia Ujian

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Sekretaris

Drs. ZULFARHMI, M.Kom





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Nomor : 424/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021  
Lampiran : --  
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 11 Syaban 1442 H  
25 Maret 2021 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun  
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahi  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **TATI APRINA MANIK**  
N P M : 1703100080  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **FUNGSI PENGAWASAN DISTRIBUSI KARTU TANI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN SIMALUNGUN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan



**Dr. ARSELIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Cc : File.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
**DINAS PERTANIAN**  
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun  
**PAMATANG RAYA** Telp (0622) 331180, 331188 Kode Pos 21162

Pamatang Raya, 24 Mei 2021

Nomor : 520/ 1776 /20.2 /2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di -

Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 424/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021, tanggal 25 Maret 2021 perihal Mohon diberi izin Penelitian Mahasiswa.

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini telah melaksanakan penelitian di Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun atas Nama :

Nama Mahasiswa : Tati Aprina Manik  
N I M : 1703100080  
Program Studi : Ilmu Administrasi Politik.  
Semester : VIII ( Delapan ) / Tahun Akademik 2020/2021.  
Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Distribusi Kartu Tani Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Simalungun.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas Pertanian Kab. Simalungun  
Sekretaris.

  
JENRI SARAGIH, SP. M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19721111 199803 1 007



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### I. KETERANGAN PERORANGAN

1	Nama lengkap	Tati Aprina Manik
2	Tempat Lahir / Tgl. Lahir	P.Siantar/ 14 April 1999
3	Jenis Kelamin	/Wanita
4	A g a m a	Islam
5	Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6	Program Studi	Ilmu Administrasi Publik
7	Telepon/HP	0822-6710-7697
8	Email	Aprina678@gmail.com
9	Alamat Rumah	Marihat Huta, Dolok Parmonangan, Kec. Dolok Panribuan, Kab. Simalungun
10	Anak Ke	I ( Satunya)
11	Nama Orang Tua	Ayah : Henri Manik Ibu : Rohani Tiondaon
12	Riwayat Pendidikan	1. SD : Tamat Dari SD Negeri 091455 Marihat Huta Tahun 2011, Berijazah 2. SMP : SMP NEGERI 1 DOLOK PANRIBUAN Tahun 2014, Berijazah 3. SMA :SMA SWASTA SULTAN AGUNG PEMATANG SIANTAR Tahun 2017, Berijazah 4. Kuliah Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2017 Sampai sekarang.

Acc Pb 07-2021/R

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Judul : Fungsi Pengawasan Distribusi Kartu Tani Dalam Rangka  
Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Simalungun**

Nama	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan/Pekejaan	:

**Daftar Pertanyaan :**

**A. Adanya Penetapan Standar dalam Distribusi kartu Tani Di Kabupaten Simalungun**

1. Bagaimana standar pelaksanaan pengawasan distribusi kartu tani di Kabupaten Simalungun ?
2. Apakah pelaksanaan pengawasan distribusi Kartu Tani sudah sesuai dengan standar yang berlaku ?
3. Apakah Kartu Tani sudah didistribusikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

**B. Adanya Kegiatan Pengawasan Distribusi Kartu Tani**

1. Bagaiman Fungsi Pengawasan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dalam pendistribusian kartu tani ?
2. Apakah ada Kerja sama dengan pihak lain dalam pengawasan distribusi kartu tani di Kabupaten simalungun ?
3. Apakah sudah tersedia tenaga pengawas yang mencukupi dalam pelaksanaan pengawasan distribusi kartu tani di Kabupaten Simalungun ?



**C. Adanya Bimbingan dan Pengarahan dalam pengawasan Distribusi Kartu Tani di Kabupaten Simalungun**

1. Apakah Dinas Pertanian /BPP Kabupaten Simalungun sudah melakukan sosialisasi Kartu Tani ?
2. Apakah pengawasan distribusi kartu tani di Kabupten Simalungun rutin dilakukan ?
3. Apakah ada temuan penyimpangan dari pendistribusian kartu Tani di Kabupaten Simalungun ?

**D. Adanya Tindakan Koreksi dan Perbaikan**

1. Adakah koreksi yang dilakukan terhadap kegiatan pendistribusian kartu Tani di Kabupaten Simalungun ?
2. Adakah perbaikan sebagai tindak lanjut dari koreksi dalam kegiatan pengawasan yang sebelumnya ?
3. Apa Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk meningkatkan pelaksanaan distribusi kartu tani di Kabupaten Simalungun?

**DAFTAR PIC KARTU TANI KC PEMATANGSIANTAR**

NO	KECAMATAN	JUMLAH	PENYERAHAN	PIC	YG MENYERAHKAN	OUTLET AKTIVASI	SALES
1	BANDAR HULUAN	379		HOYDA/081396132976		CABANG	DARMA/HENDRA
2	GUNUNG MALIGAS	323	24/03/2021	JHINI MEKAR/085262211222		CABANG	DARMA/ELSA
3	GUNUNG MALELA	1,688	24/03/2021	ICHSANUL/085212820475		CABANG	DARMA/ELSA
4	PEMATANG SILIMAHUTA	387	SUDAH	ALEXANDER/081269790071	JHON	SARDOL	ELSA
5	PURBA	2.001	SUDAH	DARIAHMAN SINAGA/085373131102	JHON	SARDOL	HENDRA
✓6	BANDAR	2.408	18/02/2021	JAMALUDDIN/085261696752	EDU	PERDAGANGAN	LAURA
7	BANDAR MASILAM	362	SUDAH	MULIONO/081263316212	EDU	PERDAGANGAN	LAURA
8	UJUNG PADANG	1.254	SUDAH	ABD RAHMAN PURBA/081396784411	EDU	PERDAGANGAN	LAURA
9	DOLOG MASSAGAL	226	SUDAH	JUPRI/082276922900	ALFIAN GANDA	SEBELAWAN	MEI
10	JAWA MARAJA	1,136	11/12/2020	MULIO KISWANDI/081379491795	ALFIAN GANDA	SERBELAWAN	MEI
11	SIANTAR	2.107	28/12/2020	AGUS DWI/082160064800	NORA	HORAS	NINA
12	TANAH JAWA	926	28/12/2020	NELSON SIMANJUNTAK/081397158993	NORA	HORAS	NINA
13	PANOMBEAN PANEI	1,541	SUDAH	TINIAR SARAGIH/085275012955	ALFIANDRI	RAYA	PATHRESIA
14	RAYA	476	SUDAH	JON CHRISTIAN/081396475100	ALFIANDRI	RAYA	PATHRESIA
15	PEMATANG BANDAR	1.475	24/03/2021	LASMARIDA PURBA/085372108916		DISERAHKAN KE PARAPAT/03/08	DARMA
16	GIRLANG SIPANGAN BOLON	98	18/12/2020	HASDA/081919935983	TIVITA	PARAPAT	WITA
✓17	DOLOG PANRIBUJAN	2,344	22/12/2020	ROLII/081376067492		PARAPAT	WITA
18	HATONDUHAN	1,354	22/12/2020	SANDO SINAGA/082366260504	WITA	CABANG	WITA/HERI
19	HUTA BAYU RAJA	3,717		ZAMRUDDIN/081263059479			YOLA/HENDRA
20	SIDAMANIK	1,979	28/12/2020	RUKINI/082362286875	WITA	PARAPAT	YOLA/HENDRA